

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PENTING UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN

Oleh: H. Syaiful Sagala

Abstrak

Kurikulum sebagai program pengajaran suatu jenjang pendidikan dirancang oleh guru dengan cara mengorganisasikan isi dan bahan pelajaran dalam bentuk dokumen. Mengacu pada dokumen pembelajaran yang telah dirancang oleh guru, pada prinsipnya implementasi kurikulum dalam bentuk pengalaman belajar harus lebih mudah dan efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pengawas sekolah, pelaksana dan staf pendukung lainnya. Sasaran utama pengembangan kurikulum adalah peserta didik, masyarakat, dan subjek yang akan diajarkan. Adapun model kurikulum berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas, yang sifatnya lebih praktis. Oleh karena itu, rencana, ide-ide, atau gagasan-gagasan yang akan dituliskan ke dalam suatu dokumen kurikulum seyogianya berpegang pada acuan teknis kurikulum sebagai rencana. Rencana dan ide ide diformulasikan dalam dokumen kurikulum yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Proses implementasi kurikulum untuk semua bidang studi atau mata pelajaran selalu menggambarkan keterkaitan proses dengan, tujuan dan konten, kejelasan teori belajar, keterkaitan dengan sosial, budaya, teknologi, ketersediaan fasilitas dan alat, alokasi waktu, fleksibilitas, peran guru dan siswa, peran evaluasi dan *feedback mechanism*.

Kata kunci: kurikulum, kualitas, pembelajaran, implementasi kurikulum

PENDAHULUAN

Sebelum kurikulum diimplementasikan perlu ditinjau secara berkala, sebagian atau secara keseluruhan apakah sudah sesuai dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi pelajaran. Para perencana, pengembang dan pelaku kurikulum perlu melakukan analisis secara cermat dengan cara membedah (*scan*) kurikulum. Hal ini dilakukan agar dapat dirumuskan kembali standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang diperlukan dengan cara menetapkan hasil belajar dan indikator pengukuran hasil belajar. *Scan* kurikulum dilakukan untuk mengetahui suatu peta kurikulum baik untuk satu semester maupun untuk satu tahun. *Scan* kurikulum mempunyai dua bagian, yaitu (1) kompetensi

dasar dari bidang studi atau mata pelajaran; dan (2) kompetensi proses dan kompeten yang dapat diajarkan berkali-kali dalam kompetensi dari bidang studi atau mata pelajaran.

Dalam melakukan bedah kurikulum guru harus memahami seluruh standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator dari mata pelajaran yang akan diajarkan. Langkah-langkah *scan* kurikulum antara lain dilakukan dengan cara (1) analisis kurikulum untuk satu semester dan setahun pada mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab guru; (2) menentukan beberapa kompetensi yang cocok dengan materi pelajaran. Tempatkan kompetensi-kompetensi kunci/utama pada bagian yang sesuai dalam *scan* kurikulum; (3) guru melakukan review pada *scan* kurikulum untuk penyesuaian materi dengan kompetensi dan indikator; (4)

analisis apakah materi pelajaran terlalu banyak atau terlalu sedikit?; (5) apakah perlu mengatur kembali atau hanya menambahkan hal-hal penting saja?; dan (6) apakah guru puas dengan hasilnya.

Setelah dilakukan bedah kurikulum, selanjutnya menyusun rencana pembelajaran yang dapat menentukan model dan mengatur sejumlah strategi pembelajaran dan implementasikan dalam kegiatan belajar. Ketika implementasi kurikulum dipertimbangkan menjadi suatu yang harus dilaksanakan, menurut Miler dan Seller (1985:277) ada sesuatu yang baru sebagai inovasi yang mesti dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam kurikulum. Hasil dari bedah kurikulum dimungkinkan adanya suatu inovasi yang mesti dilakukan baik kegiatan belajar yang dilaksanakan di kelas, di laboratorium, di perpustakaan, maupun di tempat lainnya. Implementasi inovasi baru dalam pengembangan kurikulum ini akan mempengaruhi interaksi antar orang dalam kelas dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap guru dan juga sekolah dimana inovasi itu diimplementasikan.

Organisasi yang bertanggung jawab terhadap guru ada organisasi pemerintah seperti dinas pendidikan juga sekolah dan ada organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dinas pendidikan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu membantu guru mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yaitu pengawas sekolah. Sedangkan PGRI melalui organ organisasinya dapat mengembangkan kurikulum bersama guru sebagai anggotanya. Namun fakta menunjukkan masih ada diantara pengawas sekolah yang tidak mampu membantu guru mengembangkan kurikulum. Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran

tersebut pada kesempatan ini akan dikaji mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

PEMBAHASAN

Kurikulum bukan hanya menyiapkan anak untuk kehidupannya sekarang tetapi juga yang akan datang. Kebijakan yang dapat memberi jaminan bahwa kualitas pengembangan kurikulum memenuhi standar kualitas layanan belajar di sekolah dengan memperhitungkan setiap tahapannya akan menunjukkan adanya peningkatan kualitas, jika tidak tampak adanya indikasi peningkatan kualitas, maka dilakukan penyesuaian pada hal-hal yang dipandang perlu. Isi kurikulum adalah mempersiapkan siswa untuk tugas tersebut. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru mestinya mencermati tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kajian ini akan membahas mengenai apa itu kurikulum, model kurikulum dan hasil belajar, kurikulum teknologis atau berbasis kompetensi, prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum, dan implementasi kurikulum

Apa itu Kurikulum ?

Kurikulum mempunyai pengertian yang cukup kompleks, dan sudah banyak didefinisikan oleh para pakar kurikulum. Kata “kurikulum” bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa latin yang kata dasarnya adalah “*currere*”, secara harafiah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut ada garis start dan batas finish. Dalam lapangan pendidikan pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, dari mana mulai

diajarkan dan kapan diakhiri, dan bagaimana cara untuk menguasai bahan ajar agar dapat mencapai kelulusan. Menurut Grayson (1978), kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (*out-comes*) yang diharapkan dari suatu pembelajaran.

Pasal 1, ayat 19 UUSPN No. 20 tahun 2003 mengatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Zais (1976: 7) mendefinisikan “*curriculum is a racecourse of subject matters to be mastered*”. Pengertian kurikulum yang serupa dengan pengertian kurikulum tersebut dikemukakan pula oleh Beauchamp (1972), Sellar dan Miller (1985), dan Oliva (1992), yang semuanya menyebutkan cakupan kurikulum dalam lingkup yang luas. Kurikulum juga dapat diberi pengertian secara sempit, seperti silabus, program pengajaran suatu mata pelajaran, atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

Dalam arti sempit kurikulum ditafsirkan sebagai materi pelajaran, sedangkan pengertian yang luas ditafsirkan sebagai segala upaya yang dilakukan di bawah naungan sekolah. Spektrum di antara kedua kutub itu menafsirkan kurikulum sebagai perencanaan interaksi antara pelajar dan guru-guru untuk mencapai tujuan pendidikan (Miller & Siller, 1985:3). *Colombo Plan Staff College for Technician Education* (1982: 9), misalnya, mengemukakan bahwa “*curriculum is the product of curriculum planning. It is a written document intended to be used by teachers for developing teaching strategies for specific groups of student*”. Cakupan pengertian kurikulum di atas, baik yang luas

maupun sempit, pada dasarnya menyiratkan hal yang sama yaitu interaksi antara pelajar dan guru-guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat dipahami bahwa kurikulum adalah produk dari perencanaan yang disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi.

Sehingga kurikulum memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) yang ditetapkan dapat tercapai. Setiap kurikulum membentuk suatu desain yang menggambarkan pola organisasi dari komponen-komponen kurikulum yang terdiri dari (1) tujuan; (2) isi atau materi; (3) proses atau sistem penyampaian materi; dan (4) evaluasi. Keempat komponen kurikulum tersebut baik dalam dokumen maupun implementasi merupakan suatu sistem yang saling berkait erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Keberadaan empat komponen ini, secara operasional menurut Tyler (1949:1) mengacu pada pertanyaan berikut (1) *What educational purposes should the school seek to attain?*; (2) *What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes?*; (3) *How can these educational experiences be effectively organized?*; dan (4) *How can we determine whether these purposes are being attained?*. Pertanyaan tersebut meminta para pelaku pendidikan khususnya pengawas sekolah pada dinas pendidikan kemudian kepala sekolah dan guru di sekolah mampu memberi jaminan bahwa pengalaman belajar bagi para peserta didik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari disain kurikulum. Pengalaman belajar dirancang dalam kurikulum yang dalam prosesnya jelas semua tahapan belajar yang

dilalui oleh siswa, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menggambarkan kompetensi. Dengan modal pengetahuan dan keterampilan tersebut siswa akan mampu memecahkan masalah dalam hidupnya bahkan masalah dalam lingkungannya.

Model Kurikulum dan Hasil Belajar

Dalam khasanah ilmu kurikulum terdapat banyak konsep kurikulum, model kurikulum yang bersandar pada kebutuhan individu untuk memecahkan masalah. Artinya kurikulum merupakan landasan untuk semua aktivitas dalam usaha-usaha memberhasilkan kegiatan pembelajaran. Good (1972) dan Travers (1973) mengemukakan bahwa model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Lebih lanjut ditegaskannya bahwa model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan (Sanjaya, 2008:82).

Model kurikulum berfungsi memberikan arah dalam pendesainan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mencapai berbagai tujuan dan/atau kompetensi. Secara konseptual, model kurikulum menurut Sukmadinata (2002: 81-101) dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (1) model kurikulum subyek akademik (KSA), sebagai pendidikan klasik yang dipengaruhi oleh filsafat pendidikan *perennialisme* dan *esensialisme*; (2) model kurikulum *humanistik*, yang banyak dipengaruhi oleh filsafat pendidikan *progresivisme* dan *romantisisme*; (3) model kurikulum rekonstruksi sosial, yang banyak dipengaruhi oleh filsafat pendidikan

Interaksionalisme; dan (4) model kurikulum teknologis atau berbasis kompetensi (KBK). Pembelajaran berbasis kompetensi menurut Miller dan Sellar (1985:51) cenderung terfokus pada sasaran-sasaran belajar dan penilaian dengan menegaskan waktu menjadi variabel yang ditentukan oleh kebutuhan eksternal dan internal.

Apabila pelajar diberi waktu yang cukup sesuai tingkat kemampuannya, maka pelajar akan mampu menguasai materi pelajaran. Kemunculan KBK bukan obat manjur atau penyelesaian akhir untuk pendidikan profesional dan bukan yang terakhir, tetapi merupakan media untuk memperbaiki pendidikan. Setelah pemerintah berulang kali melakukan perbaikan model kurikulum, maka pemerintah Indonesia sampailah pada kesimpulan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi pada tingkat satuan pendidikan (KTSP). KTSP menurut Sanjaya (2008:127) merupakan kurikulum berorientasi pada pencapaian kompetensi, oleh karena itu kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK). KTSP memperjelas kewenangan guru mengembangkan kurikulum sebagai implementasi manajemen berbasis sekolah.

Hal ini dapat dilihat dari unsur yang melekat pada KTSP itu sendiri, yakni adanya standar kompetensi, kompetensi dasar, dan adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum. Kompetensi kunci dalam implementasi KBK-KTSP menggambarkan kemampuan kunci atau generik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas pada setiap unit kompetensi. Pertanyaannya siapa yang menyusun dan mengelolanya. Pengelolaan kurikulum menurut Sujanto (2007:44) sepenuhnya ditangani oleh sekolah

sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Sesuai model manajemen berbasis sekolah (MBS) gurulah yang bertanggungjawab menyusun dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus dan rencana pembelajaran mengacu pada standar isi yang dikembangkan pemerintah. Permasalahannya, bagaimanakah kurikulum disampaikan melalui kegiatan mengajar agar kualitas, lulusan/output bertambah tinggi dan siswa menjadi kompeten. Hal ini tergantung pada kemampuan dan profesionalisme guru dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum dan pemerintah daerah memfasilitasinya.

Kurikulum Teknologis atau Berbasis Kompetensi

Model kurikulum teknologis atau kurikulum berbasis kompetensi (*Competency Based Curriculum*) juga menekankan isi kurikulum, tetapi berupa kompetensi atau kecakapan dan keterampilan kerja, dengan ciri utama pencapaian kompetensi minimal dalam bidang studi tertentu, oleh karena itu disebut berbasis kompetensi (Sukmadinata, 2002: 96). Guru menyusun KTSP menggunakan pendekatan KBK meyakini bahwa pendidikan memfokuskan pada kemahiran pelajar pada kompetensi khusus. Kompetensi itu merupakan gabungan keterampilan, perilaku, dan pengetahuan yang dapat didemonstrasikan oleh pelajar setelah mereka belajar.

Beberapa pokok pikiran yang melandasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menurut Nurhadi, Yasin, dan Senduk (2004:82) antara lain (1) menyadari bahwa peningkatan mutu pendidikan selama ini belum mencapai pada taraf yang memadai (*critical mass*) yang mampu meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat pada umumnya; (2) referensi mengenai mutu pendidikan perlu didudukkan secara utuh yang mencakup dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni dari segi moral, akhlak, akal, pengetahuan, keterampilan, dan amal perbuatan; dan (3) selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan kognitif.

Pandangan ini membawa dampak terabaikannya aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni, olah raga, dan "life skill". Dengan pertimbangan tersebut, maka dilakukan penyempurnaan kurikulum dengan pendekatan berbasis kompetensi. Jika disimak lebih lanjut, ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi menurut Sukmadinata, (2002: 97-98) adalah (1) tujuan di arahkan pada penguasaan kompetensi, yang dirumuskan dalam bentuk perilaku; (2) metode merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan dan apabila terjadi tanggapan yang diharapkan maka tanggapan tersebut diperkuat; (3) bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi; dan (6) evaluasi dilakukan setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit atau semester terdiri dari evaluasi formatif dan sumatif yang umumnya berbentuk tes objektif yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi ini pada dasarnya sama dengan belajar-tuntas (BT). Hanya saja, pada BT lebih mengutamakan aspek pengajaran, sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi cenderung terfokus pada sasaran-sasaran belajar dan penilaian kompetensi dari hasil belajar (Miller

& Seller, 1985: 51). Pembelajaran berbasis kompetensi memberi ruang yang cukup pada aspek psikomotorik, sehingga ada keseimbangan antara kognitif dan psikomotorik. Agar siswa memiliki karakter jujur, kerja keras, cermat, arif dan bijaksana maka diberi muatan afektif. Keseimbangan kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pengembangan kurikulum dan implementasinya akan menghasilkan SDM berkarakter unggul dan mulia.

Prinsip-Prinsip Umum Pengembangan Kurikulum

Oliva (1992:12) mengatakan *bahwa "curriculum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex ide or set of ideas"*. Permasalahan yang sering terjadi adalah (1) ide atau pokok pikiran itu tidak dirumuskan secara jelas; (2) para pengembang dokumen adalah orang yang berbeda dari penemu ide tersebut, maka apa yang diinginkan tidak dapat dipahami dengan baik oleh para pengembang dokumen; dan (3) konsekuensinya, pengembangan pengalaman belajar dapat berbeda dari apa yang dikehendaki rencana tertulis (Hasan, 2004: 2). Padahal kurikulum dan hasil belajar bagi setiap siswa menurut Sujanto (2007:59) hendaknya dapat menggali, memahami, menghargai dan melakukan sesuatu sebagai hasil belajar di sekolah.

Kurikulum dan hasil belajar berfokus pada aktivitas siswa dan hasil belajar yang dapat dicapai. Hamalik (2004:14) menyebutkan beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu (1) objektivitas; (2) keterpaduan; (3) manfaat; (4) efisiensi dan efektifitas; (5) kesesuaian; (6) keseimbangan; (7) kemudahan; (8) berkesinambungan; dan (9) pembakuan.

Sedangkan Sukmadinata (2000:150-152) menyebutkan dua prinsip pengembangan kurikulum prinsip umum berkaitan dengan kebijakan dalam pengembangan kurikulum secara makro dan prinsip khusus.

Prinsip umum pengembangan kurikulum terdiri dari lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip relevansi, dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu (a) *relevan* dalam kurikulum sendiri (atau meminjam istilah fisika, relevansi yang bersifat *sentripetal*), yakni ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum, dan (b) *relevansi* ke luar (meminjam istilah fisika, relevansi yang bersifat *sentrifugal*) berbentuk kesesuaian desain kurikulum dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan lapangan berdasarkan *need analysis*, dan kesesuaian mutu lulusan dengan standar pengguna (standar kompetensi). Relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat.
2. Prinsip *fleksibilitas*, yakni desain kurikulum memiliki sifat lentur atau fleksibel dalam mengorganisir dan melayani kebutuhan pengguna (melalui program efektif) dan keragaman kemampuan dan pengalaman peserta (melalui pembelajaran variasi). Kurikulum mempersiapkan peserta didik yang

memiliki latar belakang dan kemampuan berbeda untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain.

3. Prinsip *kontinuitas*, yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara kesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama, perlu selalu ada komunikasi dan kerjasama antara pengembang kurikulum sekolah dasar dengan SMTP, SMTA, dan Perguruan Tinggi.
4. Prinsip *praktis*, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Prinsip ini juga disebut efisien. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan-peralatan yang sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum bukan hanya harus ideal tetapi juga praktis.
5. Prinsip *efektivitas* dan *efisiensi*. Walaupun kurikulum harus murah dan sederhana tapi keberhasilannya tetap harus memberi jaminan kualitas. Prinsip efektivitas berkaitan dengan pengendalian mutu keberhasilan proses kurikulum (pembelajaran)

dalam melejitkan dan mengoptimalkan perkembangan peserta didik, sedangkan prinsip efisiensi berkaitan dengan pengendalian mutu, ketepatan pelaksanaan kurikulum dan pemanfaatan komponen pendukung.

Keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Karenanya pengembangan ide kurikulum dimulai dari evaluasi kurikulum yang akan dapat mengembangkan (1) kualitas masyarakat masa depan yang diinginkan. Untuk menjamin terpenuhinya kualitas masyarakat masa depan tentu perlu dijelaskan dan ditegaskan visi kehidupan masa depan. Kemudian dirumuskan standar kualitas hidup masa kini sebagai dasar menuju masa depan; (2) kualitas yang harus dikembangkan. Apa saja kualitas SDM masa kini dan masa depan yang harus dikembangkan lebih dulu diidentifikasi, dianalisis, dan ditentukan. Jika sudah dipilih hal-hal pokok yang dapat mengembangkan kualitas kurikulum selanjutnya diambil kebijakan kurikulum setelah mempertimbangkan penentuan filosofi, penentuan tujuan kurikulum, dan menentukan model kurikulum.

Dengan demikian prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah prinsip efektivitas pengendalian mutu keberhasilan proses kurikulum (pembelajaran) dalam mengoptimalkan perkembangan kualitas belajar peserta didik. Prinsip efisiensi berkaitan dengan pengendalian mutu ketepatan pelaksanaan kurikulum dan pemanfaatan komponen pendukung. Jenis dan jumlah fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan kurikulum dan implementasinya diidentifikasi dengan memperhatikan kompetensi utama, substansi

kajian, dan proses pembelajaran. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari siswa, guru, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, dan masyarakat.

Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum adalah terjemahan kurikulum dokumen menjadi kurikulum sebagai aktivitas atau kenyataan. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum antara lain adalah (1) aspek makro pengembangan kurikulum (kondisi masyarakat, politik, sosial, budaya, ekonomi, teknologi); (2) aspek materi dan prosedur pengembangan kurikulum sebagai ide; (3) aspek materi dan prosedur pengembangan kurikulum sebagai dokumen; (4) aspek materi dan implementasi diwujudkan dalam kegiatan belajar dan mengajar menjadikan siswa lebih kompeten; dan (5) aspek materi dan prosedur evaluasi hasil belajar.

Kondisi masyarakat dalam implementasi kurikulum adalah (1) tradisi pendidikan (publik dan masyarakat); (2) sistem pendidikan (sentralisasi dan desentralisasi); (3) kebijakan tentang pendidikan (wajib belajar (*compulsory education*), dana pendidikan, mata pelajaran); (4) sistem persekolahan (misalnya 6-3-3; 8-4-2; 7-5-2); (5) politik pengembangan kurikulum (nasional, daerah, *grass-root*); (6) kebijakan tentang hari sekolah (jumlah hari, jam, libur); (7) sikap masyarakat terhadap pendidikan; (8) kondisi budaya, sosial, ekonomi; (9) kebijakan tentang aksesabilitas, jumlah dan daya tampung sekolah; dan (10) posisi sekolah terhadap masyarakat.

Implementasi kurikulum yang membelajarkan peserta didik harus (1) *relevan* ide dengan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu, teknologi; (2) kejelasan ide; (3) *feasibility* pengembangan ide; dan (4) konsekuensi ide terhadap lembaga pendidikan, dana, dan kebijakan. Sedangkan *Characteristics of the innovative aspects of the curriculum* adalah (1) *amount of change(s)*: menunjukkan ruang lingkup perubahan yang dimiliki suatu kurikulum baru; dan (2) *clarity of ideas* kejelasan filosofis, model, konsep, istilah yang digunakan terutama dihubungkan dengan kejelasan bagi pengguna kurikulum (kepala sekolah, guru, pengawas).

Strategies of implementation yaitu pelatihan dalam jabatan (*resocialization*), ketersediaan dokumen kurikulum dan *curriculum materials*, ketersediaan bantuan, peran kepala sekolah (pengetahuan, sikap, kepedulian), guru (pengetahuan, sikap, ketrampilan, pengalaman, dan bantuan yang diterima), besar/kecilnya sekolah, fasilitas belajar yang dimiliki, tradisi, suasana kerja, dan manajemen. Kurikulum seringkali diimplementasikan dengan memisah-misahkan mata pelajaran-mata pelajaran.

Oleh karena itu, kurikulum ini seringkali disebut sebagai *separated subject curriculum*, dan sering pula disebut sebagai *subject-centered curriculum*, karena menjadikan mata pelajaran sebagai porosnya (Nasution, 1988: 143). Adapun Puskurnas (2002:2) menyebutkan bahwa implementasi dan pengembangan KBK di Indonesia mempertimbangkan prinsip-prinsip (1) keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh siswa; (2) penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia

yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tatanan peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa; (3) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika diperhitungkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar; (4) kesamaan memperoleh kesempatan bagi semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Siswa kurang beruntung secara ekonomi dan sosial, berbakat, dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai kemampuan dan kecepatannya; (5) abad pengetahuan dan teknologi informasi. Belajar mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian; (6) pengembangan keterampilan hidup dengan memasukkan unsur keterampilan hidup agar siswa memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif; (7) belajar sepanjang hayat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal serta pendidikan alternative yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; (8) berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri agar siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya; dan (9) pendekatan menyeluruh dan kemitraan.

Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari TK sampai PT. Fulan dan Park (1981) mengemukakan perencanaan untuk implementasi kurikulum selalu gagal karena beberapa alasan antara lain (1) perencana mengambil keputusan sementara ia tidak memahami dan menyadari situasi yang sedang

dihadapi para pelaku implementasi; (2) perencana memperkenalkan perubahan tanpa menjelaskan cara untuk mengidentifikasi dan cara melakukan perubahan itu; dan (3) perencana tidak berusaha memahami nilai-nilai, ide, dan pengalaman-pengalaman yang penting bagi pelaku implementasi, dan lain sebagainya.

Untuk menghindari rintangan dan hambatan potensial dalam implementasi kurikulum, maka para perencana dan pengambil kebijakan harus duduk bersama melakukan diskusi untuk mengklarifikasi masalah-masalah dan menyamakan persepsi mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum yang menjadikan siswa kompeten. Kemudian pengambil kebijakan mengidentifikasi solusi dari berbagai permasalahan dalam implementasi kurikulum dengan guru, pekerja kurikulum, dan pihak lain yang memungkinkan untuk disertakan (Miller dan Seller, 1985:277). Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa implementasi kurikulum dapat dilakukan jika (1) dilakukan sosialisasi (penatar, waktu, peserta, dan kriteria keberhasilan); (2) kesiapan pengelola; (3) kesiapan guru; (4) ketersediaan sumber; (5) ketersediaan dana; (6) waktu; (8) proses; (9) evaluasi; dan (10) *feedback mechanism*. Semua hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan stakeholders pendidikan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing masing.

PENUTUP

Guru perlu bertanya pada diri sendiri apakah sebagai pendidik guru itu telah menyusun sendiri silabus dan rencana

pelaksanaan pengajarannya (RPP). Karena jika bukan guru itu sendiri yang menyusunnya, maka guru tersebut sebetulnya belum mampu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang baik disusun oleh guru adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan, dan latar belakang anak. Memang disadari bahwa kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Namun demikian guru tentu mengetahui bahwa kurikulum menyiapkan siswa untuk dapat hidup dan bekerja dalam masyarakat. Pengembangan suatu kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Perencanaan di bidang pendidikan juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Perlu mengintegrasikan unsur-unsur penting dalam kurikulum yang menunjang kemampuan untuk bertahan hidup (*soft skills*).

KEPUSTAKAAN

Hamalik, O. (1981). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Pustaka Martina.

Miler, J. P. dan Seller, W. (1985). *Curriculum Perspectives and Practice*. New Yrk: Longman.

Nasution, S. (1988). *Kurikulum dan Pengajaran*. Bandung: Bina Aksara.

Nurhadi, Yasin, B. dan Senduk, A. G. (2004). *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Oliva, P. F. (1992). *Developing Curriculum: A Guide to Problrms, Principles and Process*. New York: Harper and Publisher.

Sagala, H. S. (2007). *Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sujanto, Bedjo (2007). *Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum: Mengorek Kegelisahan guru*. Jakarta: Sagung Seto.

Tiler, R. W. (1974). *Developing a Curriculum A Practical Guide: Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago and Londong: The University of Chicago Press.

Penulis adalah guru besar dan dosen pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unimed; dan Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Medan.